

Pengembangan Kurikulum dan Proses Pembelajaran Pendidikan Tinggi: Kajian tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Chaira Saidah Yusrie

[irayusrie26@gmail.com](mailto:irayusrie26@gmail.com)

Ernawati

[ernawatihumaira@gmail.com](mailto:ernawatihumaira@gmail.com)

Dadang Suherman

[dads\\_bisnis@yahoo.co.id](mailto:dads_bisnis@yahoo.co.id)

Ujang Cepi Barlian

[ujangcepibarlian@yahoo.co.id](mailto:ujangcepibarlian@yahoo.co.id)

**ABSTRACT**

*Curriculum management is a form of joint effort or effort to facilitate the achievement of teaching goals and improve the quality of teaching and learning interactions, which include planning, organizing, actuating and evaluating. The development of higher education curriculum is the formulation of basic concepts as a foundation or foundation that explains in depth and comprehensively the philosophical, sociological, psychological, empirical and juridical ratios, and is equipped with a higher education curriculum management system. The research that the author uses is a type of literature review research or often called library research, Library Research which is research that is focused on collecting a series of citations from various books or articles and laws/regulations related to the object of study. Higher education is part of higher education in Indonesia, where the position of universities is at the fore front of the intellectual life of the nation, by developing science and technology to advance general welfare and social justice for all Indonesian people. Every education unit, including tertiary institutions, has a system to produce quality graduates. The higher education system in Indonesia has four main stages, namely (1) Input; (2) Process; (3) Output; and (4) Outcomes. In the education system the curriculum can play a role as: 1) A source of higher education management policies to determine the direction of education; 2) The philosophy that will color the formation of society and the academic climate; 3) Patrons or learning patterns, which reflect study materials, methods of delivery and learning assessments; 4) The atmosphere or climate that is formed from the results of higher education managerial interactions in achieving learning objectives; 5) Quality reference from quality assurance process; and 6) a measure of the success of higher education in producing graduates that are beneficial to society. A curriculum is inseparable from the learning process, where a good learning process has important elements in several ways, namely: (1) clear learning outcomes; (2) Healthy higher education organizations; (3) transparent and accountable higher education management; (4) Availability of higher education learning designs in the form of a clear curriculum document and according to the needs of the job market; (5) Capabilities and skills of reliable and professional academic and non-academic human resources; (6) Availability of adequate learning infrastructure and facilities.*

**Keywords:** Curriculum Development, Learning Process, Higher Education

**ABSTRAK**

Manajemen kurikulum adalah sebuah bentuk usaha atau upaya bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pengajaran dan meningkatkan kualitas interaksi belajar

mengajar, yang didalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, actuating dan evaluasi. Pengembangan kurikulum pendidikan tinggi merupakan formulasi konsep-konsep dasar sebagai landasan atau pijakan yang menjelaskan secara mendalam dan komprehensif aspek filosofis, sosiologis, psikologis, rasio empirik dan yuridis, serta dilengkapi sistem pengelolaan kurikulum pendidikan tinggi. Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kajian pustaka atau sering disebut penelitian pustaka, *Library Research* (kepustakaan) yang merupakan penelitian-penelitian yang difokuskan pada pengumpulan serangkaian kutipan dari berbagai buku atau artikel dan undang-undang/peraturan yang berkaitan dengan objek kajian. Perguruan Tinggi adalah bagian dari pendidikan tinggi yang ada di Indonesia, dimana posisi perguruan tinggi sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan cara mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap satuan pendidikan termasuk perguruan tinggi memiliki sistem untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sistem pendidikan tinggi di Indonesia memiliki empat tahapan pokok, yaitu (1) Input; (2) Proses; (3) Output; dan (4) Outcomes. Dalam sistem pendidikan kurikulum dapat berperan sebagai: 1) Sumber kebijakan manajemen pendidikan tinggi untuk menentukan arah penyelenggaraan pendidikannya; 2) Filosofi yang akan mewarnai terbentuknya masyarakat dan iklim akademik; 3) Patron atau pola pembelajaran, yang mencerminkan bahan kajian, cara penyampaian dan penilaian pembelajaran; 4) Atmosfer atau iklim yang terbentuk dari hasil interaksi manajerial perguruan tinggi dalam mencapai tujuan pembelajarannya; 5) Rujukan kualitas dari proses penjaminan mutu; serta 6) ukuran keberhasilan perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat. Sebuah kurikulum tidak terlepas dari proses pembelajaran, dimana proses pembelajaran yang baik memiliki unsur yang penting dalam beberapa hal, yaitu: (1) capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang jelas; (2) Organisasi perguruan tinggi yang sehat; (3) Pengelolaan perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel; (4) Ketersediaan rancangan pembelajaran perguruan tinggi dalam bentuk dokumen kurikulum yang jelas dan sesuai kebutuhan pasar kerja; (5) Kemampuan dan ketrampilan sumber daya manusia akademik dan non akademik yang handal dan profesional; (6) Ketersediaan sarana-prasarana dan fasilitas belajar yang memadai.

**Kata kunci:** *pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, pendidikan tinggi*

## **PENDAHULUAN**

Pada dasarnya setiap satuan pendidikan memiliki sistem untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sistem pendidikan tinggi di Indonesia memiliki empat tahapan pokok, yaitu (1) Input; (2) Proses; (3) Output; dan (4) Outcomes. Input Perguruan Tinggi (PT) adalah lulusan SMA, MA, dan SMK sederajat yang mendaftarkan diri untuk berpartisipasi mendapatkan pengalaman belajar dalam proses pembelajaran yang telah ditawarkan. Input yang baik memiliki beberapa indikator, antara lain nilai kelulusan yang baik, namun yang lebih penting adalah adanya sikap dan motivasi belajar yang baik. Setelah mendaftarkan diri dan resmi menjadi mahasiswa, tahapan selanjutnya adalah menjalani proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang baik memiliki unsur yang baik dalam beberapa hal, yaitu: (1) capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang jelas; (2) Organisasi PT yang sehat; (3) Pengelolaan PT yang transparan dan akuntabel; (4) Ketersediaan rancangan pembelajaran PT dalam bentuk dokumen kurikulum yang jelas dan

sesuai kebutuhan pasar kerja; (5) Kemampuan dan ketrampilan SDM akademik dan non akademik yang handal dan profesional; (6) Ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas belajar yang memadai.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mensyaratkan bahwa PT harus melakukan proses penjaminan mutu secara konsisten dan benar agar dapat menghasilkan lulusan yang baik. Setelah melalui proses pembelajaran yang baik, diharapkan PT akan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Beberapa indikator yang sering digunakan untuk menilai keberhasilan lulusan PT adalah (1) IPK; (2) Lama Studi dan (3) Predikat kelulusan yang disandang. Namun proses ini tidak hanya berhenti disini, untuk dapat mencapai keberhasilan, perguruan tinggi perlu menjamin agar lulusannya dapat terserap di pasar kerja. Keberhasilan PT untuk dapat mengantarkan lulusannya agar diserap dan diakui oleh pasar kerja dan masyarakat inilah yang akan membawa nama dan kepercayaan PT di mata calon pendaftar yang akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas dan kuantitas pendaftar (input).

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan sebuah kurikulum dan proses pembelajaran pendidikan tinggi kaitannya dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Sedangkan tujuan penelitian ini agar secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan tentang Pengimplementasian Kurikulum berbasis KKNI sebagai kerangka acuan dalam menerapkan sebuah pola Kurikulum yang terintegrasi, antara kurikulum dengan ketercapaian Visi Misi dan Tujuan Program Studi yang dituangkan kedalam RPS, rancangan capaian pembelajaran (Learning Outcome) dan SKPI khususnya bidang Ilmu Pendidikan. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta masukan yang berguna dalam pengembangan kurikulum khususnya kepada lembaga (perguruan tinggi, Prodi pengembangan kurikulum dan peneliti.

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian yang penulis gunakan termasuk dalam jenis penelitian kajian pustaka atau sering disebut penelitian pustaka, *Library Research* (kepuustakaan) yang merupakan penelitian-penelitian yang difokuskan pada pengumpulan serangkaian kutipan dari berbagai buku atau artikel dan undang-undang/peraturan yang berkaitan dengan objek kajian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dimana yang dikumpulkan berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan dengan menggunakan pendekatan data non angka atau berupa dokumen-dokumen manuskrip maupun pemikiran-pemikiran yang ada, dimana dari data tersebut kemudian dikategorikan berdasarkan relevansinya dengan pokok permasalahan yang dikaji. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, yaitu data non angka yang berupa tulisan atau teks-teks yang terdapat dalam buku-buku yang terkait dengan pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran.

Metode penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kajian pustaka atau sering disebut penelitian pustaka, yaitu menghimpun data dengan cara menggunakan bahan-bahan tertulis seperti: Buku, artikel, surat kabar, majalah, dan dokumen lainnya, yang sekiranya memiliki hubungan dengan tema penelitian. Adapun pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku-buku, transkrip, agenda dan sebagainya. Teknik analisis data menggunakan *Content analysis* yang menekankan pada analisis ilmiah tentang isi pesan dan komunikasi. Hampir semua disiplin ilmu sosial dapat menggunakan teknik analisis isi dengan memanfaatkan prosedur yang dapat menarik kesimpulan dari sebuah buku atau dokumen. Analisis inilah selanjutnya penulis gunakan sebagai cara dalam meneliti pendapat-pendapat dari dokumentasi yang ada. Selain itu metode analisa data yang digunakan penulis menggunakan metode-metode deduktif. Metode deduktif adalah cara berfikir yang berangkat dari kaidah universal menuju kepada hal-hal yang khusus.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Landasan Pemikiran Kurikulum Pendidikan Tinggi**

Berbagai macam parameter kualitas akan dipasang untuk menstandarkan mutu dan kualitas lulusan di berbagai belahan bumi. Berbagai kesepakatan dan kesepahaman antar Negara-negara di ASEAN mulai ditetapkan. Roadmap atau peta pengembangan mobilitas bebas tenaga kerja professional antar Negara di ASEAN telah dibentangkan. Perkembangan roadmap tersebut dimulai semenjak tahun 2008 dengan melakukan harmonisasi berbagai peraturan dan sistem untuk memperkuat institusi pengembang SDM. Kemudian pada tahun 2010 mulailah disepakati Mutual Recognition Agreement (MRA) untuk berbagai pekerjaan dan profesi. Beberapa bidang profesi yang telah memiliki MRA hingga tahun ini adalah: (1) engineers; (2) architect; (3) accountant; (4) land surveyors; (5) medical doctor; (6) dentist; (7) nurses, dan (8) labor in tourism. Atas dasar prinsip kesetaraan mutu serta kesepahaman tentang kualifikasi dari berbagai bidang pekerjaan dan profesi di era global, maka diperlukanlah sebuah parameter kualifikasi secara internasional dari lulusan pendidikan di Indonesia.

Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Pemerintah memberikan dorongan sekaligus dukungan untuk mengembangkan sebuah ukuran kualifikasi lulusan pendidikan di Indonesia dalam bentuk sebuah kerangka kualifikasi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menjadi sebuah tonggak sejarah baru bagi dunia pendidikan tinggi di Indonesia agar menghasilkan sumber daya manusia berkualitas dan bersaing ditingkat global. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 08 Tahun 2012, pada pasal 1 menyatakan bahwa: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat

menyandingkan, menyetarakan dan mengintergrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Perjalanan perubahan kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia secara signifikan dimulai tahun 1994 melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, dimana penyusunan kurikulum ini mengutamakan ketercapaian penguasaan IPTEKS, kurikulum ini dikenal dengan nama Kurikulum Berbasis Isi. Pada model kurikulum ini, ditetapkan mata kuliah wajib nasional pada program studi yang ada. Kemudian pada tahun 2000, atas amanah UNESCO melalui konsep the four pillars of education, yaitu learning to know, learning to do, learning to be dan learning to live together (Dellors, 1998), Indonesia merekonstruksi konsep kurikulumnya dari berbasis isi ke Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Kurikulum era tahun 2000 dan 2002 ini mengutamakan pencapaian kompetensi, sebagai wujud usaha untuk mendekatkan pendidikan pada kondisi pasar kerja dan industri. Pada Kurikulum Berbasis Kompetensi terdiri atas kurikulum inti dan institusional. Implementasi KBK memerlukan penetapan kompetensi utama oleh kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan. Sedangkan kompetensi pendukung dan kompetensi lain, ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri. Dengan dorongan perkembangan global yang saat ini dituntut adanya pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah disetarakan secara internasional, dan dikembangkannya KKNi, maka kurikulum di perguruan tinggi sejak tahun 2012 mengalami sedikit pergeseran dengan memberikan ukuran penyetaraan capaian pembelajarannya. Kurikulum ini mendasarkan pada pencapaian kemampuan yang telah disetarakan untuk menjaga mutu lulusannya. Kurikulum ini dikenal dengan nama Kurikulum Pendidikan Tinggi.

Kurikulum memiliki makna yang beragam baik antar negara maupun antar institusi penyelenggara pendidikan. Hal ini disebabkan adanya interpretasi yang berbeda terhadap kurikulum, yaitu dapat dipandang sebagai suatu rencana (plan) yang dibuat oleh seseorang atau sebagai suatu kejadian atau pengaruh aktual dari suatu rangkaian peristiwa (Johnson, 1974). Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Jika dikaitkan dengan sistem pendidikan tinggi, maka kurikulum dapat berperan sebagai: 1) Sumber kebijakan manajemen pendidikan tinggi untuk menentukan arah penyelenggaraan pendidikannya; 2) Filosofi yang akan mewarnai terbentuknya masyarakat dan iklim akademik; 3) Patron atau pola pembelajaran, yang mencerminkan bahan kajian, cara penyampaian dan penilaian pembelajaran; 4) Atmosfer atau iklim yang terbentuk dari hasil

interaksi manajerial PT dalam mencapai tujuan pembelajarannya; 5) Rujukan kualitas dari proses penjaminan mutu; serta 6) ukuran keberhasilan PT dalam menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dari penjelasan ini, nampak bahwa kurikulum tidak hanya berarti sebagai suatu dokumen saja, namun merupakan suatu rangkaian proses yang sangat krusial dalam pendidikan.

### **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi**

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau disingkat KKNi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Pernyataan ini ada dalam Peraturan Presiden Nomor. 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Sangat penting untuk menyatakan juga bahwa KKNi merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional dan pelatihan yang dimiliki negara Indonesia. Maknanya adalah, dengan KKNi ini memungkinkan hasil pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, dilengkapi dengan perangkat ukur yang memudahkan dalam melakukan penyepadanan dan penyejajaran dengan hasil pendidikan bangsa lain di dunia. KKNi juga menjadi alat yang dapat menyaring hanya SDM yang berkualifikasi yang dapat masuk dan bekerja ke Indonesia. Fungsi komprehensif ini menjadikan KKNi berpengaruh pada setiap bidang dan sektor di mana sumber daya manusia dikelola, termasuk di dalamnya pada sistem pendidikan tinggi, utamanya pada kurikulum pendidikan tinggi.

#### **1. KKNi sebagai Tolok Ukur**

Pergeseran wacana penamaan kurikulum pendidikan tinggi dari KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) ke penamaan Kurikulum Pendidikan Tinggi (K-DIKTI) memiliki beberapa alasan yang penting untuk dicatat, diantaranya: a) Penamaan KBK tidak sepenuhnya didasari oleh ketetapan peraturan, sehingga masih memungkinkan untuk terus berkembang. b) KBK mendasarkan pengembangannya pada kesepakatan penyusunan kompetensi lulusan oleh perwakilan penyelenggara program studi yang akan disusun kurikulumnya. c) Ketiadaan parameter ukur dalam sistem KBK menjadikan sulit untuk menilai apakah program studi jenjang pendidikan yang satu lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. d) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) memberikan parameter ukur berupa jenjang kualifikasi dari jenjang 1 terendah sampai jenjang 9 tertinggi. Setiap jenjang KKNi bersepadan dengan level Capaian Pembelajaran (CP) program studi pada jenjang tertentu, yang mana kesesuaiannya untuk pendidikan tinggi adalah level 3 untuk D1, level 4 untuk D2, level 5 untuk D3, level 6 untuk D4/S1, level 7 untuk profesi (setelah sarjana), level 8 untuk S2, dan level 9 untuk S3. e) Capaian Pembelajaran pada setiap level KKNi diuraikan dalam diskripsi sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, tanggung jawab dan hak dengan

pernyataan yang ringkas yang disebut dengan deskriptor generik. Masing masing deskriptor mengindikasikan kedalaman dan level dari CP sesuai dengan jenjang program studi. f) K-DIKTI sebagai bentuk pengembangan dari KBK menggunakan level kualifikasi KKNI sebagai pengukur CP dan bahan penyusun kurikulum suatu program studi. g) Perbedaan utama K-DIKTI dengan KBK ada pada kepastian dari jenjang program studi karena CP yang diperoleh memiliki ukuran yang pasti.

## **2. Capaian Pembelajaran sebagai Bahan Utama Penyusunan K-DIKTI**

Akuntabilitas penyusunan K-DIKTI dapat dipertanggung jawabkan dengan adanya KKNI sebagai tolok ukur dalam penyusunan Capaian Pembelajaran (CP). Secara khusus kewajiban menyusun CP yang menggunakan tolok ukur jenjang KKNI dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi pada pasal 10 ayat 4, yakni : setiap program studi wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaran minimal mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjang. Bahkan pada ayat yang sama juga dinyatakan bahwa : setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi.

Capaian pembelajaran dapat dipandang sebagai resultan dari hasil keseluruhan proses belajar yang telah ditempuh oleh seorang pembelajar/mahasiswa selama menempuh studinya pada satu program studi tertentu, dimana unsur capaian pembelajaran mencakup: Sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, dan tanggung jawab/hak. Seluruh unsur ini menjadi kesatuan yang saling berkaitan dan juga membentuk relasi sebab akibat. Oleh karenanya, unsur CP dapat dinyatakan sebagai : siapapun orang di Indonesia, dalam perspektif sebagai SDM, pertama-tama harus memiliki sikap dan tata nilai ke Indonesiaan, padanya harus dilengkapi dengan kemampuan yang tepat dan menguasai/didukung oleh pengetahuan yang sesuai, maka padanya berlaku tanggung jawab sebelum dapat menuntut/mendapat haknya. Kesatuan unsur CP tersebut digambarkan seperti apabila unsur-unsur pada CP tersebut dijadikan bahan utama dalam penyusunan kurikulum pada program studi, maka lulusannya akan dapat mengkonstruksi dirinya menjadi pribadi yang utuh dan unggul dengan karakter yang kuat dan bersih.

## **Langkah-Langkah Penyusunan Kurikulum**

### **1. Penyusunan struktur kurikulum**

Pengaturan mata kuliah dalam tahapan semester sering dikenal sebagai struktur kurikulum. Secara teoritis terdapat dua macam pendekatan struktur kurikulum, yaitu model serial dan model paralel. Pendekatan model serial adalah pendekatan yang menyusun mata kuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Pada pendekatan serial ini, mata kuliah disusun

dari yang paling dasar (berdasarkan logika keilmuannya) sampai di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (advanced). Setiap mata kuliah saling berhubungan yang ditunjukkan dengan adanya mata kuliah prasyarat. Mata kuliah yang tersaji di semester awal akan menjadi syarat bagi mata kuliah di atasnya. Adapun pendekatan struktur kurikulum model parallel menyajikan mata kuliah pada setiap semester sesuai dengan tujuan kompetensinya. Struktur kurikulum parallel dilaksanakan dalam bentuk semesteran yaitu dengan mengelompokkan beberapa mata kuliah berdasarkan kompetensi yang sejenis. Sehingga setiap semester akan mengarah pada pencapaian kompetensi serupa dan tuntas pada semester tersebut, tanpa harus menjadi syarat bagi mata kuliah disemester berikutnya

## 2. Langkah-langkah Penyusunan K-DIKTI

Pada awal pengembangan kurikulumnya, program studi harus menetapkan **capaian pembelajaran** pendidikannya, yang dikenal dengan **profil (peran mahasiswa)**. Dari profil inilah, capaian pembelajaran di setiap tahap pendidikan dapat diturunkan dengan lebih akuntabel dan reliabel. Maknanya, tidak ada program studi yang terlewat dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yang dituangkan dalam KKNI. Ketentuan dari penetapan capaian pembelajaran ini, diatur dalam standar kompetensi lulusan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang SN-DIKTI. Kemudian, langkah berikutnya adalah menetapkan **bahan kajian** untuk dapat memenuhi ketercapaian dari capaian pembelajaran tersebut. Ketentuan dari penetapan bahan kajian ini, ditetapkan melalui standar isi dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014. Pola pengembangan yang sesuai dengan peraturan mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi ini, akan menjamin keterwujudan kurikulum yang akuntabel terhadap KKNI, serta lulusan yang dihasilkan sesuai dengan kualifikasi dari KKNI.

## 3. Penetapan Capaian Pembelajaran

Deskripsi Capaian Pembelajaran (CP) menjadi komponen penting dalam rangkaian penyusunan kurikulum pendidikan tinggi (K-DIKTI). Secara umum CP dapat melakukan beragam fungsi, diantaranya: a) Sebagai penciri, deskripsi, atau spesifikasi dari program studi. b) Sebagai ukuran, rujukan, pembandingan pencapaian jenjang pembelajaran dan pendidikan. c) Kelengkapan utama deskripsi dalam SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah). d) Sebagai komponen penyusun kurikulum dan pembelajaran.

Karena sifatnya yang dapat berfungsi secara multifaset, maka sangat mungkin format deskripsi CP beragam sesuai dengan kebutuhannya. Pada fungsi tertentu CP dapat dan harus dideskripsikan secara ringkas, namun pada saat yang lain perlu untuk menguraikan secara lebih rinci. Keberagaman format CP sesuai dengan fungsinya tidak boleh menghilangkan unsur-unsur utamanya, sehingga CP pada program studi yang sama akan tetap memberikan pengertian dan makna yang sama walaupun dinyatakan dengan format berbeda.

#### **4. Unsur dalam Capaian Pembelajaran**

Pengertian capaian pembelajaran menurut KKNi (Perpres RI No.8 Tahun 2012) adalah: internasialisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis, ketrampilan, afeksi, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja. Dalam SN-DIKTI salah satu yang terkait dengan pengertian termuat dalam salah satu standar yakni "standar kompetensi lulusan" yang tertera pada pasal 5 Ayat (1) yang dituliskan sebagai berikut: "Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan". Dimana sikap diartikan sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual, personal, maupun sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Sedangkan Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Dalam SN-Dikti, unsur keterampilan dibagi menjadi dua yakni keterampilan umum dan keterampilan khusus. a) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan b) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

Keterkaitan utama CP adalah pada diskriptor generik KKNi, hal ini sangat jelas dikarenakan definisi CP dinyatakan pertama kali dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Dalam KKNi, CP merupakan penera (alat ukur) dari apa yang diperoleh seseorang yang menyelesaikan suatu proses belajar baik yang terstruktur maupun tak terstruktur. Dengan demikian CP akan mengidentifikasi unsur-unsur pencapaian pembelajaran sehingga dapat diidentifikasi jenjang atau derajadnya.

#### **5. Tahap penyusunan capaian pembelajaran**

Dalam SN-DIKTI capaian pembelajaran lulusan terdiri dari unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Rumusan unsur sikap dan keterampilan umum yang merupakan bagian dari capaian pembelajaran telah dirumuskan dalam SN-DIKTI sebagai standar minimal yang harus dimiliki oleh setiap lulusan sesuai jenis dan jenjang program

studinya. Sedangkan unsur ketrampilan khusus dan pengetahuan yang merupakan rumusan kemampuan minimal lulusan suatu program studi tertentu, wajib disusun oleh forum program studi yang sejenis atau diinisiasi dan diusulkan oleh suatu program studi. Hasil rumusan CP dari forum atau program studi dikirim ke Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan DIKTI, dan setelah diverifikasi oleh tim pakar, hasil akhir rumusan CP bersama rumusan CP program studi yang lain akan dimuat dalam laman DIKTI untuk masa sanggah dalam waktu tertentu sebelum ditetapkan sebagai standar kompetensi lulusan (SKL) oleh Dirjen DIKTI.

Penyusunan capaian pembelajaran (CP), secara substansi dapat dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut: 1. Bagi program studi yang belum memiliki rumusan “kemampuan lulusannya” dapat mencari referensi rumusan capaian pembelajaran lulusan dari program studi sejenis yang memiliki reputasi baik, dan dari sumber lain yang pernah ditulis, misal dari: asosiasi profesi, kolegium keilmuan, konsorsium keilmuan, jurnal pendidikan, atau standar akreditasi dari negara lain. 2. Bagi program studi yang telah memiliki rumusan ‘kemampuan lulusannya’ dapat mengkaji dengan membandingkan serta menyandingkan rumusan tersebut terhadap rumusan capaian pembelajaran pada KKNI untuk melihat kelengkapan unsur deskripsi dan kesetaraan jenjang kualifikasinya. 3. Menyesuaikan hasil rumusan dengan rumusan sikap dan ketrampilan umum yang telah ditetapkan di SN-DIKTI sebagai salah satu bagian kemampuan minimal yang harus dicapai.

#### **6. Jenis Formulasi CP**

Pada saat dipergunakan sebagai penciri atau pembeda program studi yang nantinya akan dituliskan pada SKPI yang menyatakan ragam kemampuan yang dicapai oleh lulusan, pernyataan CP cenderung ringkas namun mencakup semua informasi penting yang dibutuhkan. Sedangkan pada saat dipergunakan untuk mengembangkan kurikulum pada program studi, pernyataan CP justru harus rinci sehingga dapat menggambarkan kemampuan pada setiap profil yang dituju.

Sebagai penciri program studi, seringkali pernyataan CP dituntut untuk ringkas mungkin sehingga dapat saja dinyatakan dalam satu paragraf yang mencakup seluruh unsurnya. Pernyataan CP untuk kebutuhan pengembangan kurikulum dapat dilakukan dengan menelusuri dari profil yang dituju dan mengantisipasi bahan kajian yang akan disusun. CP pada pengembangan kurikulum berpeluang lebih mudah dikembangkan. Hasil penyusunan CP untuk mengembangkan kurikulum dapat dipergunakan sebagai perantara dalam menyusun CP untuk penciri program studi yang lebih ringkas. Polanya adalah dengan merekonstruksi deskripsi rinci pada CP kurikulum dengan melakukan filterisasi untuk mendapatkan substansi dari setiap pernyataan sehingga diperoleh kalimat atau paragraf yang konvergen.

#### **7. Alur Penyusunan CP**

Pola atau alur penyusunan CP, utamanya untuk referensi dalam menyusun kurikulum, dapat merujuk pada skema dasar dokumen kurikulum. Dokumen kurikulum minimal mencakup: a. Profil: postur yang diharapkan pada saat pembelajar lulus atau menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dengan kesesuaian jenjang KKNI b. CP (Capaian Pembelajaran): dapat menyesuaikan dengan deskriptor KKNI atau unsur CP pada SN-DIKTI. c. Bahan Kajian: sebagai komponen/materi yang harus dipelajari/diajarkan untuk mencapai CP yang direncanakan. d. Mata kuliah: merupakan wadah sebagai konsekuensi adanya bahan kajian yang dipelajari mahasiswa dan harus diajarkan oleh dosen. e. Metoda Pembelajaran: merupakan strategi efektif dan efisien dalam menyampaikan atau mengakui isi bahan kajian selama proses pembelajaran. f. Metoda Penilaian: proses identifikasi dan penentuan tingkat penetrasi maupun penguasaan bahan kajian oleh pembelajar melalui parameter dan variabel ukur yang akurat. g. Dosen/laboran/teknisi: SDM yang tepat dan kompeten pada bidangnya sesuai dengan profil yang dituju yang harus ada dan siap. h. Sarana Pembelajaran: yang membangun lingkungan dan suasana belajar yang memberdayakan.

Penyusunan CP dengan pola ini setidaknya membutuhkan langkah penentuan atau identifikasi profil lulusan. Profil dapat disepadankan dengan spesifikasi teknis dari hasil proses produksi, dalam hal ini adalah proses pembelajaran pada institusi pendidikan. Dengan demikian, pendeskripsian Profil menjadi langkah utama yang harus dilakukan dalam menyusun CP. Tidak akan ada CP yang dapat dihasilkan tanpa mengetahui profil terlebih dahulu.

#### **8. Langkah Menentukan Profil**

Seyogyanya profil program studi disusun oleh kelompok program studi sejenis, sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional. Dalam penyusunan profil keterlibatan dari stakeholders juga akan memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan yang nantinya akan menggunakan hasil didiknya. Hal ini menjamin mutu dari profil lulusan. Penentuan profil juga wajib merujuk pada jenjang kualifikasi lulusan sesuai dengan KKNI. Aspek yang perlu menjadi pertimbangan mencakup : sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, tanggung jawab dan hak yang akan diemban oleh seorang lulusan. Kesesuaian tersebut dilakukan dengan membandingkan terhadap deskriptor generik KKNI. Untuk membangun kekhasan program studi, dianjurkan untuk mengidentifikasi keunggulan atau kearifan lokal/daerah. Sehingga rumusan profil akan memuat informasi mengenai kemampuan untuk menjawab persoalan dan tantangan yang berkembang atau muncul di daerah masing-masing, bahkan jika perlu menjadi nilai unggul dari program studi bersangkutan.

#### **9. Alur Menyusun Pernyataan CP**

Profil yang tersusun dengan cermat akan memudahkan dalam menyusun pernyataan CP. Metode paling sederhana dalam menyusun profil adalah dengan menguraikan setiap definisi profil menjadi unsur-unsur CP. Tip sederhana dalam menyusun CP dari profil yang ada adalah dengan pola pikir berikut: profil adalah indikasi apa yang dapat diperankan oleh seorang lulusan, sedangkan CP adalah apa yang harus dapat dilakukan oleh lulusan sesuai profil tersebut.

Perumusan CP dengan menguraikan kedalam unsur KKNI harus juga memasukkan komponen lain yakni: a. Indikator tingkat capaian: merupakan gradasi pernyataan deskripsi sesuai dengan jenjang yang akan dicapai, hal ini tertera dalam deskripsi generik KKNI; b. Visi dan misi program studi: menjamin kekhasan dan cita-cita atau tujuan dari program studi yang akan dicapai; c. Bidang keilmuan: sangat penting untuk program studi jenis akademik sesuai dengan nomenklatur; d. Bidang keahlian: pendidikan jenis profesi dan vokasi wajib mengidentikasi secara teliti; e. Kemungkinan bahan kajian yang diperlukan untuk membangun dan menyusun CP yang direncanakan; f. Referensi prodi sejenis yang berkembang dinegara lain sebagai pembanding jika ada; g. Peraturan yang ada; h. Kesepakatan prodi dan juga profesi terkait.

## **Paradigma Proses Pembelajaran**

### **1. Paradigma Pembelajaran**

Kehidupan di abad ini memerlukan perubahan paradigma pendidikan tinggi yang bersifat mendasar. Bentuk perubahan-perubahan tersebut adalah: (a) perubahan dari pandangan kehidupan masyarakat lokal ke masyarakat dunia (global), (b) perubahan dari kohesi sosial menjadi partisipasi demokratis (utamanya dalam pendidikan dan praktek berkewarganegaraan), dan (c) perubahan dari pertumbuhan ekonomi ke perkembangan kemanusiaan.

UNESCO (1998) menjelaskan bahwa untuk melaksanakan empat perubahan besar di pendidikan tinggi tersebut, dipakai dua basis landasan, berupa empat pilar pendidikan: (a) learning to know, (b) learning to do yang bermakna pada penguasaan kompetensi dari pada penguasaan ketrampilan, dematerialisasi pekerjaan dan kemampuan berperan untuk menanggapi bangkitnya sektor layanan jasa, dan bekerja di kegiatan ekonomi informal, (c) learning to live together (with others), dan (d) learning to be, serta; belajar sepanjang hayat (learning throughout life).

Empat pilar pendidikan tersebut sebenarnya merupakan satu kesatuan utuh. Pengelompokan pilar hanya mencirikan pengutamaan substansi materi dan proses pembelajaran. Hal ini berarti bahwa kompetensi sebagai ciri utama dari penguasaan learning to do dari suatu materi pembelajaran tidak dapat dipisahkan dengan elemen kompetensi yang terkandung dalam learning to know, learning to live together, dan learning to be dari materi yang bersangkutan atau materi-materi pembelajaran lainnya. Oleh karenanya, pemisahan antara materi pembelajaran atas hardskill dan

softskill dalam satu kurikulum tidak berlaku lagi. Makna arti hard skill dan soft skill diakomodasi dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan dimensi proses kognitif, afektif, dan psikomotor.

Perubahan-perubahan mendasar pendidikan tinggi yang berlangsung di abad ini, akan meletakkan kedudukan pendidikan tinggi sebagai: (a) lembaga pembelajaran dan sumber pengetahuan, (b) pelaku, sarana dan wahana interaksi antara pendidikan tinggi dengan perubahan pasaran kerja, (c) lembaga pendidikan tinggi sebagai tempat pengembangan budaya dan pembelajaran terbuka untuk masyarakat, dan (d) pelaku, sarana dan wahana kerjasama internasional.

## **2. Kondisi Pembelajaran di Perguruan Tinggi saat ini**

Kondisi pembelajaran di program studi/ perguruan tinggi masih cukup beragam. Perguruan tinggi yang telah menjalankan sistem penjaminan mutu dengan baik dari level institusi sampai program studi umumnya telah melaksanakan pembelajaran yang berbasiskan capaian pembelajaran, namun ada permasalahan utama, yaitu: a. Kurangnya pemahaman tentang esensi dari kurikulum dalam sistem pendidikan b. Kurangnya persiapan dosen di dalam menyiapkan perangkat pembelajaran sebelum melakukan pembelajaran; c. Ketidakjelasan rumusan capaian pembelajaran; d. Ketidakjelasan strategi dan metode pembelajaran; e. Ketidakjelasan apakah pilihan strategi dan metode pembelajaran merupakan pilihan yang tepat untuk memunculkan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan; f. Aktivitas asesmen cenderung pada pemberian skor/nilai kepada mahasiswa dari pada memberikan tuntunan untuk membuka potensinya; g. Instrumen untuk melakukan asesmen cenderung mencirikan penilaian sumatif dari pada penilaian formatif.

Hal ini dapat mengindikasikan bahwa dalam melaksanakan proses pembelajaran yang baik, masih ada beberapa dosen yang kurang pemahamannya atau dosen kurang peduli terhadap capaian pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, serta cara penilaian yang tepat. Disamping itu, sistem penjaminan mutu pendidikan sering tidak berfungsi dengan baik, seperti sistem pendukung terkait dengan tata kelola sumber daya manusia, sarana prasarana dan lingkungan pembelajaran, sistem pelayanan, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut dari hasil evaluasi. Di sisi lain, tidak sedikit perguruan tinggi yang telah menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan dengan baik, mampu mengembangkan nilai-nilai internalnya untuk memenuhi kebutuhan stakeholders yang dinamis. Perguruan tinggi seperti ini dengan mudah mendapatkan pengakuan dari masyarakat lokal sekitarnya, nasional dan bahkan internasional. Sistem pembelajaran merupakan bagian penting untuk mampu menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi. Sistem pembelajaran yang baik mampu memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk membuka potensi dirinya dalam menginternalisasikan knowledge, skills, attitudes dan pengalaman belajar sebelumnya. Selain itu materi pembelajaran umumnya disusun tidak mengikuti taksonomi dimensi pengetahuan yang akan dicapai

dan dimensi proses kognitif urutan serta cara penyampaiannya. Oleh karenanya, proses pembelajaran yang banyak dipraktekkan sekarang ini sebagian besar berbentuk penyampaian secara tatap muka (*lecturing*), atau penyampaian secara searah (dari dosen kepada mahasiswa). Pada saat mengikuti kuliah atau mendengarkan ceramah, mahasiswa akan kesulitan untuk mengikuti atau menangkap makna esensi materi pembelajaran, sehingga kegiatannya sebatas membuat catatan yang kebenarannya diragukan. Disamping itu ada kecenderungan lain yaitu mahasiswa saat ini kurang mampu menyimak. Hal ini terjadi sebagai akibat dari ketergantungan pada bahan tayang dan fotocopy bahan tayang dari dosen. Mahasiswa kurang terbiasa dengan mencatat dengan menggunakan model "*mind mapping*" atau model "*taking notes*" lainnya. Mereka merasa tentram karena bahan tayang dalam bentuk power point dapat diperoleh dari dosennya. Kebiasaan semacam ini perlu diubah, karena mahasiswa menjadi pasif.

Pola proses pembelajaran dosen aktif dengan mahasiswa pasif ini efektifitasnya mencari dan menemukan pengetahuan. Mahasiswa harus didorong untuk memiliki motivasi dalam diri mereka sendiri, kemudian berupaya keras mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Perubahan pendekatan dalam pembelajaran dari *Teacher Centered Learning* (TCL) menjadi *Student Centered Learning* (SCL) adalah perubahan paradigma, yaitu perubahan dalam cara memandang beberapa hal dalam pembelajaran, yakni; a) pengetahuan, sesuatu yang sudah jadi yang tinggal ditransfer dari dosen ke mahasiswa sebagai hasil konstruksi atau hasil transformasi oleh pembelajar, b) belajar, adalah menerima pengetahuan (pasif-reseptif), mencari dan mengkonstruksi pengetahuan secara aktif dan spesifik, c) pembelajaran, penyampaian pengetahuan atau mengajar (ceramah dan kuliah), dimana dosen berpartisipasi bersama mahasiswa membentuk pengetahuan.

Pola pembelajaran di perguruan tinggi yang berlangsung saat ini perlu dikaji untuk dapat dipetakan pola keragaman penyimpangan, besarnya penyimpangan, dan persentase dari masing-masing kelompok pola, terhadap baku proses pembelajaran yang benar. Sementara itu di NUS Singapura, melalui Center for Development of Teaching and Learning (<http://www.cdtl.nus.edu.sg>) telah disosialisasikan praktek pembelajaran dengan pendekatan penyelesaian problem secara kreatif. Mahasiswa dihadapkan pada masalah nyata di bidang sains dan diberi tugas untuk menyelesaikannya sebagai suatu cara pembelajaran. Dosen diharapkan dapat menerima kesalahan dalam proses pembelajaran sebagai hal yang wajar dan memotivasi untuk memperbaiki secara terus menerus. Jadi proses pembelajaran yang diterapkan benar-benar menyatu dengan materi pembelajaran yang diformat sesuai dengan dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitif secara benar menurut empat pilar pembelajaran. Dengan demikian proses pembelajaran memiliki karakteristik yang mencerminkan

sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

### **3. Perubahan dari TCL ke Arah SCL**

Pola pembelajaran yang terpusat pada dosen (TCL) seperti yang dipraktekkan pada saat ini sudah tidak memadai untuk mencapai tujuan pendidikan berbasis capaian pembelajaran. Berbagai alasan yang dapat dikemukakan antara lain adalah: (a) perkembangan IPTEK dan Seni yang sangat pesat dengan berbagai kemudahan untuk mengaksesnya merupakan materi pembelajaran yang sulit dapat dipenuhi oleh seorang dosen, (b) perubahan kompetensi keprofesionalan yang berlangsung sangat cepat memerlukan materi dan proses pembelajaran yang lebih fleksibel, (c) kebutuhan untuk mengakomodasi demokratisasi partisipatif dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Oleh karena itu pembelajaran ke depan didorong menjadi berpusat pada mahasiswa (SCL) dengan memfokuskan pada capaian pembelajaran yang diharapkan. Berpusat pada mahasiswa (a) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam muatan sebagai satu hal yang belum lengkap, (b) memandang proses belajar sebagai proses untuk merekonstruksi dan mencari pengetahuan yang akan dipelajari; serta (c) memandang proses pembelajaran bukan sebagai proses pengajaran (*teaching*) yang dapat dilakukan secara klasikal, dan bukan merupakan suatu proses untuk menjalankan sebuah instruksi baku yang telah dirancang.

Proses pembelajaran adalah proses dimana dosen menyediakan berbagai macam strategi dan metode pembelajaran dan paham akan pendekatan pembelajaran mahasiswanya untuk dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Perbedaan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada dosen (TCL) dapat dilihat pada usaha keras dosen untuk memberikan sejumlah pengetahuan yang dianggap penting, hanya ditanggapi dengan kepasifan mahasiswa, sedangkan pada pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa SCL digambarkan dengan prinsip “belajar adalah berubah” (dari gemuk ke kurus), dengan cara yang dapat dipilih sendiri oleh mahasiswa sesuai dengan kapasitas dirinya, karena yang menjadikan dirinya “berubah” (kurus) adalah dirinya sendiri. Di dalam proses perubahan pembelajaran ini dapat ditanyakan: apa tugas dosen?. Yang pasti adalah merancang berbagai metode agar peserta didik dapat memilih “cara belajar” yang tepat, dan dosen juga dapat bertindak sebagai “instruktur”, fasilitator, dan motivator.

### **4. Pembelajaran *Student Centered Learning* (SCL)**

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa “Pembelajaran adalah interaksi antara pendidik, peserta didik, dan sumber

belajar, di dalam lingkungan belajar tertentu”. Berdasarkan pada pernyataan diatas maka dalam mendeskripsikan setiap unsur yang terlibat dalam pembelajaran tersebut dapat dilihat ciri pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*). Ciri metode pembelajaran SCL sesuai unurnya dapat dirinci sebagai berikut: dosen, berperan sebagai fasilitator dan motivator; mahasiswa, harus menunjukkan kinerja, yang bersifat kreatif yang mengintergrasikan kemampuan kognitif, psikomotorik dan afeksi secara utuh; proses interaksinya, menitik beratkan pada “ *method of inquiry and discovery*”; sumber belajarnya, bersifat multi dimensi, artinya bisa didapat dari mana saja; dan lingkungan belajarnya, harus terancang dan kontekstual.

#### 5. Peran Dosen dalam Pembelajaran SCL

Didalam proses pembelajaran SCL, dosen masih memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan SCL, yaitu: a. Bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran; b. Memahami capaian pembelajaran mata kuliah yang perlu dikuasai mahasiswa diakhir pembelajaran; c. Merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang tepat; d. Menyediakan beragam pengalaman belajar yang diperlukan mahasiswa dalam rangka mencapai kompetensi yang dituntut mata kuliah; e. Membantu mahasiswa mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari; f. Mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar mahasiswa yang relevan dengan capaian pembelajaran yang akan diukur. Sementara itu, peran yang harus dilakukan mahasiswa dalam pembelajaran SCL adalah: a. Memahami capaian pembelajaran mata kuliah yang dipaparkan dosen. b. Menguasai strategi pembelajaran yang ditawarkan dosen. c. Menyepakati rencana pembelajaran untuk mata kuliah yang diikutinya. Belajar secara aktif (dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, dan terlibat dalam pemecahan masalah serta lebih penting lagi terlibat dalam kegiatan berfikir tingkat tinggi, seperti analisis, sintesis dan evaluasi), baik secara individu maupun berkelompok.

#### 6. Ragam Metode pembelajaran SCL

Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur dan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah. Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: (1) Small Group Discussion; (2) Role-Play & Simulation; (3) Case Study; (4) Discovery Learning (DL); (5) SelfDirected Learning (SDL); (6) Cooperative Learning (CL); (7) Collaborative Learning (CbL);(8)Contextual Instruction (CI); (9) Project Based Learning (PjBL); dan (10) Problem Based Learning and Inquiry (PBL). Selain kesepuluh model tersebut, masih banyak model pembelajaran lain yang belum dapat disebutkan satu persatu, bahkan setiap pendidik/dosen dapat pula mengembangkan model pembelajarannya sendiri.

## **KESIMPULAN**

Kurikulum memiliki makna yang beragam baik antar negara maupun antar institusi penyelenggara pendidikan. Hal ini disebabkan adanya interpretasi yang berbeda terhadap kurikulum, yaitu dapat dipandang sebagai suatu rencana yang dibuat oleh seseorang atau sebagai suatu kejadian atau pengaruh aktual dari suatu rangkaian peristiwa. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau disingkat KKNi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Perubahan pendekatan dalam proses pembelajaran dari *Teacher Centered Learning* (TCL) menjadi *Student Centered Learning* (SCL) adalah perubahan paradigma, yaitu perubahan dalam cara memandang beberapa hal dalam pembelajaran, yakni; a) pengetahuan, sesuatu yang sudah jadi yang tinggal ditransfer dari dosen ke mahasiswa sebagai hasil konstruksi atau hasil transformasi oleh pembelajar, b) belajar, adalah menerima pengetahuan (pasif-reseptif), mencari dan mengkonstruksi pengetahuan secara aktif dan spesifik, c) pembelajaran, penyampaian pengetahuan atau mengajar (ceramah dan kuliah), dimana dosen berpartisipasi bersama mahasiswa membentuk pengetahuan.

## **SARAN**

Berdasarkan temuan penelitian tahap I (studi pendahuluan yang merupakan kegiatan *research and information collecting* dan tahap pengembangan yang merupakan gabungan dari tahap *planning and development of the preliminary form of product*) perlu dilakukan penelitian tahap II dalam rangka validasi deskriptor spesifik KKNi Level 6. Penelitian tahap II melalui uji coba lapangan yang meliputi uji coba lapangan terbatas dan uji coba lapangan lebih luas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, S. (2007). Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bartol, K. M, and David C. Martin. (1994). Management. USA: McGraw-Hill Inc.
- Bateman, A. (1992). Management. USA: McGraw-Hill Collage
- Fattah, N. (1996). Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung: Rosdakarya.
- Hasbullah. (2006). Otonomi Pendidikan. Jakarta: PT.Grafindo
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
- Keputusan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesi Nomor 56/U/1994 Tentang Kurikulum

- Mulyasa, E. (2004). Implementasi Kurikulum 2004; Panduan Pembelajaran KBK. Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya.
- (2003). Kurikulum Berbasis Kompetensi. Konsep; Karakteristik dan Implementasi. Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. (2003). Pengembangan Kurikulum. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Oliva, F.P. (1976). Developing the Curriculum. USA: Harper Collin Publisher.
- PP Nomor: 60 & 61 Tentang Pendidikan Tinggi dan Perguruan Tinggi, Tahun 1999.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Purwanto, M. N. (2003). Psikologi Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Bandung: Citra Umbara
- Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Wacana Intelektual.
- Robbins, S. P. (1991). Organizational Behavior: Concept, Controversies, Applications. New Jersey: Prentice Hall International, Inc.
- Stoner, A.F. (1995). Management. New Jersey: Prentice Hall Inc. A. Simon & Chuster Company Englewood Cliffs
- Sukmadinata, N.S. (2005). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sutikno, S. (2012). Manajemen Pendidikan Langkah Praktis Mewujudkan Lembaga Pendidikan Yang Unggul. Lombok: Holistica.
- (2004). Kurikulum dan Pembelajaran Kompetensi. Bandung: Kesuma Karya.
- Terry, G. R. (1972). Principles of Management, Richard Rirwin, Inc. HomeWood. Illions.
- Tim K-DIKTI. (2014). Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Usman, H. (2004). Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Westra, P., dkk. (1981). Ensiklopedi Administrasi. Editor. Jakarta: Gunung Agung.